

ABSTRACT

In Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, there is only one article that explicitly mentions the phrase Holding Company and Subsidiary Company. Said phrase is found in Article 84 paragraph (2) Law Number 40 of 2007, which regulates invalidity of Article 84 paragraph (1) for shares in a Holding Company which directly or indirectly is controlled by its subsidiary. Nevertheless, there are several Articles in Law Number 40 of 2007 that implicitly regulate Holding Company and Subsidiary Company. Researcher was interested to conduct a research in hope to deliver a systematic explanation about the Holding Company's liability toward Subsidiary Company's legal action, based on the limitations of existing legislation, and a few of legal theory concerning Company in Indonesia. This research uses statute approach and conceptual approach. Researcher found that Holding Company serves as Subsidiary Company's controlling shareholder. Furthermore, researcher found that Holding Company is not personally liable for the management matters of Subsidiary Company, but is personally liable for ownership matters of Subsidiary Company which is based on the decision of General Meeting of Shareholders that is against the law.

Keywords: Holding Company, Subsidiary Company, Limited Liability Companies, Separate Legal Entity, Piercing the Corporate Veil, General Meeting of Shareholders, Board of Directors.

ABSTRAK

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT 2007), hanya ada satu Pasal yang secara eksplisit menyebutkan istilah Perseroan Induk dan Perseroan Anak. Istilah itu ditemukan pada Pasal 84 ayat (2) UUPT 2007, yang mengatur tentang tidak berlakunya Pasal 84 ayat (1) UUPT 2007 untuk saham induk Perseroan yang dikuasai secara langsung atau tidak langsung oleh anak perusahaannya. Akan tetapi, ada beberapa Pasal di dalam UUPT 2007 yang secara implisit mengatur tentang Perseroan Induk dan Perseroan Anak. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk menghasilkan penjelasan yang sistematis mengenai tanggung jawab Perseroan Induk Terhadap perbuatan hukum Perseroan Anak, berdasarkan keterbatasan peraturan yang ada dan sedikit teori hukum Perseroan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa Perseroan Induk berkedudukan sebagai pemegang saham pengendali Perseroan Anak. Selain itu, ditemukan pula bahwa Perseroan Induk tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perbuatan sehari-hari Perseroan Anak, namun bertanggung jawab secara pribadi atas perbuatan kepemilikan Perseroan Anak yang berdasarkan keputusan RUPS yang melawan hukum.

Kata kunci: Perseroan Induk, Perseroan Anak, Perseroan Terbatas, Entitas hukum yang terpisah, Menembus Tabir Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi.